

PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BUKIT MERALAYA DI DESA MEKARSARI KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS

Chichi Ismayanti¹, Agus Nurulsyam S², Erlan Suwarlan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : chichiismayanti03@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang menunjukkan Potensi wisata Bukit Meralaya belum dikembangkan secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 5 (lima) orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya oleh pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis secara umum belum dapat melaksanakan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan mempromosikan potensi wisata Bukit Meralaya yang ada di Desa Mekarsari, selain itu pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan potensi wisata Bukit Meralaya sehingga keberadaan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Desa sebaiknya dalam pengembangan potensi Wisata Bukit Meralaya melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata sehingga dapat memperoleh dukungan dalam mengajukan proposal ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena pada saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata memiliki program untuk pengembangan desa wisata.

Kata Kunci : *Pengembangan, Potensi Wisata, BukIt Meralaya, Desa Mekarsari*

PENDAHULUAN

Wisata Kampung atau yang sering disebut sebagai wisata pedesaan atau *village tourism* merupakan salah satu bentuk wisata yang dikembangkan di kawasan pedesaan. Wisatawan yang berwisata ke kampung wisata akan

mendapatkan pengalaman melihat dan mengapresiasi keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat dengan segala potensinya. Wisata kampung merupakan salah satu asset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala

keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut. Saat ini pemerintah telah mengembangkan wisata berbasis kampung dalam usaha meningkatkan ekonomi masyarakat melalui bidang pariwisata.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata menyatakan bahwa : "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah".

Indonesia dengan beraneka ragam kekayaan alam dan budaya memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Dalam kerangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wisata pemerintah mengidentifikasi dan menetapkan fokus pengembangan produk wisata Indonesia dalam tiga kategori portofolio produk, yaitu produk wisata alam, budaya dan buatan.

Menurut Fandeli (2012:171) secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata sebagai berikut :

Desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya.

Potensi dasar yang dimiliki oleh suatu desa untuk menjadi desa wisata selanjutnya perlu didukung dengan faktor peluang akses terhadap akses pasar. Faktor ini memegang peran kunci, karena suatu desa yang telah memiliki kesiapan untuk dikembangkan sebagai desa wisata tidak ada artinya manakala tidak memiliki akses untuk berinteraksi dengan pasar/wisatawan. Oleh karena itu kesiapan desa wisata harus diimbangi dengan kemampuan dalam mengembangkan objek wisata.

Pengembangan objek wisata Bukit Maralaya dilakukan dengan menetapkan Peraturan Desa Mekarsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Desa Wisata. Dalam rangka memperlancar kegiatan pengembangan desa wisata maka pemerintah desa melibatkan Karang Taruna Mekar Kencana yang kepengurusannya dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa Mekarsari Nomor 141.1/Kpt01-/Ds-2015.

Objek wisata Bukit Meralaya merupakan salah satu destinasi objek wisata yang sangat menarik bagi para wisatawan yang terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Objek wisata Bukit Meralaya dikelola oleh pemerintah desa mulai tahun 2017 dengan melibatkan Karang Taruna Mekar Kencana dan BUMDES. Adapun pengembangan objek wisata dibiayai dari dana desa sehingga pemerintah desa kesulitan dalam mempercepat pengembangan objek wisata Bukit Meralaya karena belum dapat diselesaikan sesuai dengan harapan karena keterbatasan anggaran yang hanya mengandalkan dana desa untuk pengembangan objek wisata sehingga mengakibatkan potensi objek wisata

yang dimiliki tidak dapat berkembang secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah kunjungan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel.1
Data Jumlah Kunjungan
Objek Wisata Bukit Meralaya
Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah	Persentase
2017	3.351	9,53
2018	6.865	19,51
2019	9.362	26,61
2020	15.602	44,35
Jumlah	35.180	100,00

Sumber : Desa Mekarsari, Tahun 2020

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan ke Objek wisata Bukit Meralaya selama 4 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 diketahui bahwa jumlah kunjungan mengalami peningkatan walaupun belum optimal hal ini dikarenakan masih minimnya sarana dan prasarana penunjang yang ada di Objek wisata Bukit Meralaya seperti masih kurang memadainya tempat parkir, jumlah wc/kamar mandi yang masih kurang, kurangnya warung makanan, sarana sumber air bersih yang masih kurang, penerangan yang sekitar objek wisata masih kurang dan akses jalan ke lokasi cukup jauh yaitu sepanjang 800 m dan jumlah penginapan yang masih minim. Dengan demikian kurangnya sarana dan prasarana memerlukan pengembangan lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan ke Objek wisata Bukit Meralaya.

Di sinilah pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata. Sektor pariwisata memerlukan suatu strategi dengan pola pengembangan kepariwisataan yang

terencana atau tersusun agar potensi yang di miliki bisa dikembangkan secara optimal. Di dalam memajukan sektor pariwisata di tingkat desa, peran Pemerintah Desa adalah sebagai motor penggerak yang selanjutnya memberikan kewenangan penuh kepada Karang Taruna maupun BUMDES dalam menentukan strategi-strategi pengembangan objek wisata.

Begitupula berdasarkan hasil pengamatan penulis, terlihat bahwa Potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis belum dikembangkan secara optimal, seperti ditunjukan dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa kurang mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat. Contohnya : Keberadaan objek desa wisata Bukit Meralaya kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai akibat tidak dialokasikannya anggaran dari pemerintah desa untuk pengembangan desa wisata Bukit Meralaya, seperti akses jalan ke lokasi cukup jauh yaitu sepanjang 800 m dengan kondisi jalan yang masih kurang baik, serta dukungan sarana seperti penerangan dan WC serta kamar mandi masih kurang.
2. Pemerintah desa kurang mempromosikan kebanggaan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat luas yang belum mengenal dan mengetahui keberadaan objek wisata Bukit Meralaya, terutama di luar wilayah Ciamis sehingga hal ini dibutuhkan media promosi yang dapat menjangkau masyarakat luas sehingga objek wisata Bukit

Meralaya dapat lebih dikenal oleh masyarakat.

3. Pemerintah desa kurang menghormati perbedaan-perbedaan cultural dan kehormatan manusia. Contohnya : Pemerintah desa kurang bekerjasama dengan masyarakat sehingga kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengembangkan potensi objek wisata Bukit Meralaya sehingga keberadaan objek wisata Bukit Meralaya kurang berkembang, seperti masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjaga lingkungan yang menjadi destinasi desa wisata.

Pengembangan potensi wisata dijadikan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan pariwisata, sehingga dapat memberi hasil pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya usaha pengembangan ini dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dan pariwisata berbasis masyarakat. Peran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pelaku utama dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Namun juga perlu adanya dukungan dari *stakeholder* lain seperti pemerintah daerah dan sektor swasta yang memiliki sumberdaya yang lebih besar dari segi finansial, kemitraan, informasi, pengetahuan, dan teknologi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 tahun 2015 tentang Desa Pasal 124, Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan

kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Oleh karena itu peran Pemerintah Desa sangatlah menentukan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa. Pemerintah Desa perlu merumuskan pengembangan potensi wisata dengan meningkatkan kapasitas (*capacity building*) dari seluruh elemen *stakeholder* yang terlibat baik itu Pemerintah Desa, organisasi lokal, dan masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "Pengembangan Potensi Wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis".

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini peneliti melihat adanya suatu permasalahan terkait pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan ilmu pemerintahan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan pengembangan objek wisata, hal ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pengembangan objek wisata merupakan salah satu fungsi pemerintah desa untuk melaksanakan

fungsi pengaturan sehingga keberadaan objek wisata Bukit Meralaya dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Oleh karena itu maka dalam pengembangan objek wisata perlu memperhatikan berbagai prinsip.

Pengelola desa wisata merupakan bagian dari masyarakat dan pemerintah desa, akan tetapi pemerintah desa memiliki kapasitas dan posisi yang berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang hak dan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Adanya undang-undang tersebut, desa dipandang sebagai sebuah entitas yang mampu memandirikan diri dengan mengelola aset atau potensi yang dimiliki sebagai sumber penghidupan.

Selain itu, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa : “Desa memiliki hak dan kewenangan dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa”. Hal ini memperjelas bahwa desa memiliki keleluasaan untuk melakukan pengembangan dan pembangunan desa, termasuk dalam pengembangan desa wisata. Disamping itu, adanya undang-undang tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengembangan desa wisata.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembangunan Pariwisata Nasional meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, maka pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan termasuk oleh daerah dan desa adalah sama dan sesuai atau harus berdasarkan rencana induk kepariwisataan nasional. Selain itu, sesuai dengan visi pembangunan pariwisata nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan wisata berkelas dunia, beraya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Begitupula dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2015 tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2025 bahwa perlunya dilakukan pengembangan objek wisata di daerah untuk mendorong pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Penerapan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata menurut Hadiwijoyo (2005:72) antara lain :

1. Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat
2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek;
3. Mempromosikan kebanggaan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas hidup;
5. Menjamin sustanbilitas lingkungan;
6. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik;
7. Membantu mengembangkan *cross cultural learning*;
8. Menghormati perbedaan-perbedaan *cultural* dan kehormatan manusia;
9. Mendistribusikan keuntungan yang adil di antara anggota masyarakat;
10. Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi *income* proyek masyarakat.

Selanjutnya Siswanto (2010:12) menjelaskan pendekatan konsep pengembangan pariwisata :

1. Pendekatan kemasyarakatan (*Community based*). Masyarakat lokal, intitusi-institusi lokal kemasyarakatan serta lembaga-lembaga non pemerintah, merupakan pelaku yang berperan dalam menentukan wilayah masing-masing sesuai dengan karakteristik pengembangannya menurut kriteria pengembangan pariwisata.
2. Pedekatan Sektoral (*Sectoral Based*). Dinas pariwisata dan Swasta. Bagian-bagian tersebut memberikan kontribusi terhadap program pengembangan daerah-daerah pariwisata sesuai dengan sektor masing-masing. Kebijakan sektoral yang dikeluarkan akan mengacu pada karakteristik dari masing-masing wilayah pengembangan.
3. Pendekatan Keruangan /Kewilayahaan (*Spatial Based*). Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan atau desa yang akan berperan sebagai fasilitator secara keruangan. Koordinasi dalam ruang lingkup keruangan/kewilayahaan sekaligus merupakan penentu terciptanya keseimbangan pemamfaatan ruang antara usaha-usaha pembangunan dan pelestarian. Pembangunan yang disesuaikan dengan adat dan kebudayaan daerah setempat yang akan mampu melestarikan suatu daya tarik wisata. Dalam hal ini, diperlukan suatu kesepakatan tentang penentuan pemamfaatan ruang yang berdaya guna untuk dipatuhi oleh semua pihak.

Penelitian ini menggunakan teori mengenai penerapan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata menurut Hadiwijoyo (2005:72). Hal tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk lebih memfokuskan pada peran aktor yang ada di desa, yang terdiri dari pemerintah Desa, masyarakat dan pengelola desa wisata karena mereka merupakan bagian dari sebuah desa yang memiliki hak dan kewenangan dalam pengembangan Desa Wisata. Tidak hanya itu, aktor-aktor tersebut juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang dapat saling melengkapi dalam pengembangan desa wisata yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana keterlibatan atau peran dari masing-masing aktor tersebut sehingga mampu membawa desa wisata ini menjadi salah satu desa wisata yang terus mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tiap tahunnya. Diharapkan melalui penelitian ini nantinya akan diketahui apakah masing-masing aktor tersebut telah mampu berperan strategis dalam pengembangan desa wisata, atau hanya aktor tertentu saja yang berperan dalam pengembangan yang ada di desa wisata tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemerintah desa dalam menerapkan strategi pengembangan objek wisata harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengembangan objek wisata sehingga potensi objek wisata yang ada dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan

deskriptif analisis. Hal ini dilakukan sejalan dengan pendapat Moleong, (2014:2) yang bertujuan “Untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan baik dari hasil wawancara maupun observasi”. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan sebanyak 5 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa serta menginterpretasikannya data kualitatif dengan melakukan triangulasi terhadap sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, maka berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis kurang terlaksana dengan baik karena pemerintah desa kurang memberikan pengakuan dan dukungan serta mempromosikan pariwisata yang dimiliki. Padahal pengembangan pariwisata merupakan suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Menurut Anindia (2015:9) menyatakan bahwa :

Pengembangan pariwisata (yang berkelanjutan) perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian terkait dengan dukungan dan pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan potensi wisata Bukit Meralaya hal ini dikarenakan pemerintah desa belum dapat memberikan pengakuan dan dukungan serta mempromosikan pariwisata yang dimiliki sehingga belum memberikan dampak positif dalam meningkatkan jumlah kunjungan ke objek wisata di objek wisata .

Adanya hambatan-hambatan dalam pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis karena kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat menyebabkan potensi potensi wisata Bukit Meralaya belum dapat dikembangkan. Seperti kurangnya pemerintah daerah memberikan dukungan dalam membantu mempromosikan potensi wisata Bukit Meralaya selain itu masih kurangnya kesiapan masyarakat dalam mengembangkan keberadaan objek wisata, selain itu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap potensi desa padahal apabila potensi wisata Bukit Meralaya berkembang maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di sekitar objek wisata .

Menurut Yoeti (2011: 188) kegiatan pokok yang dapat dilakukan oleh dalam mendukung keberadaan objek wisata di masyarakat diantaranya adalah : “Menyusun perencanaan pemasaran dengan mempersiapkan paket-paket wisata yang menarik bersama dengan para perantara, meningkatkan kualitas pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada wisatawan secara periodik”.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian terkait dengan dukungan dan pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan potensi wisata Bukit Meralaya hal ini dikarenakan Pemerintah Desa kurang memainkan peran penting, terutama melakukan koordinasi terhadap semua potensi dan sumber-sumber daya yang terdapat di daerah itu, sehingga harapan terhadap pariwisata sebagai katalisator bagi pembangunan dapat menjadi kenyataan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah itu.

2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis kurang ditunjang dengan keterlibatan masyarakat sejak awal pada setiap aspek pengembangan objek wisata . Peran masyarakat dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta. Tetapi kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua stakeholder lainnya. Penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada

sumberdaya pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Sunaryo (2013:218) menyatakan bahwa :

Untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian terkait dengan pelibatan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek hal ini dikarenakan pemerintah desa belum dapat mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya serta kurangnya memberikan kepastian kepada masyarakat tentang manfaat yang akan diterima dari potensi wisata Bukit Meralaya serta kurangnya melaksanakan pendidikan kepariwisataan kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam mengembangkan objek wisata .

3. Mempromosikan kebanggaan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis kurang ditunjang kegiatan promosi kebanggaan masyarakat padahal keberadaan potensi wisata Bukit Meralaya merupakan salah satu kebanggaan masyarakat yang harus diberikan perhatian baik dalam bentuk promosi, perhatian maupun dukungan. Promosi pariwisata yang diadakan untuk memberitahukan, membujuk atau meningkatkan konsumen atau wisatawan supaya wisatawan yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk datang berkunjung ke daerah yang telah dipromosikan. Oleh karena itu promosi harus dilakukan melalui media komunikasi yang efektif, sebab orang-orang yang menjadi sasaran promosi mempunyai selera dan keinginan yang berbeda-beda.

Menurut Oka (2007:76) menyatakan bahwa: “Berkembangnya pariwisata tergantung pada produksi industri pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kemudahan perjalanan, sarana dan fasilitas serta promosi”.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian terkait dengan kegiatan promosi yang dilakukan oleh pemerintah desa supaya objek wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat dapat diperkenalkan kepada masyarakat lain belum optimal sehingga banyak masyarakat yang kurang mengunjungi objek wisata tersebut selain itu kurangnya pemerintah desa dalam mempromosikan kemudahan perjalanan menuju potensi wisata Bukit Meralaya serta kurangnya

mempromosikan sarana dan fasilitas objek wisata

4. Meningkatkan kualitas hidup

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar objek wisata hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang bekerjasama dalam mengembangkan potensi Wisata Bukit Meralaya selain itu pelibatan masyarakat masih kurang dalam merencanakan pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya dan pemerintah desa kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi wisata Bukit Meralaya sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan. Kepariwisata berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Anindita (2015:11) menyatakan bahwa : ”Prinsip pengembangan pariwisata salah satunya adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata”

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian terkait dengan pengembangan pariwisata yang belum dapat meningkatkan kualitas hidup

masyarakat karena kurangnya pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata Bukit Meralaya dan kurangnya pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat sejak awal pada setiap aspek pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya sehingga Pemerintah desa kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi wisata Bukit Meralaya sebagai sarana meningkatkan kesejahteraannya.

5. Menjamin keberlangsungan /sustainability lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan potensi Wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis belum dapat menjamin suistabilitas lingkungan ada di sekitar objek wisata hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang melakukan perlindungan terhadap wisatawan dengan memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi dan Pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan kepariwisataan secara adil serta kurangnya pemerintah desa membuat kebijakan terkait perlindungan dan pemeliharaan budaya dan seni tradisional di masyarakat. Agar pengembangan pariwisata dapat berkelanjutan, maka perlu diperhatikan kode etik pengembangan pariwisata seperti menjamin Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi sumber kehidupan kepariwisataan dan melindungi lingkungan dari dampak buruk kegiatan bisnis pariwisata.

Menurut Waluyo (2007:91). Adapun kode etik dalam pengembangan pariwisata, antara lain :

a. Melakukan perlindungan terhadap wisatawan dan pemberian

kemudahan dalam penyediaan informasi.

b. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya.

c. Kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

d. Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangkaian :

1) Penghormatan, perlindungan, pemeliharaan terhadap warisan kekayaan seni, arkeologi, budaya, monumen, tempat suci, museum, tempat bersejarah;

2) Kelangsungan hidup dan berkembangnya hasil-hasil budaya, seni tradisional dan seni rakyat

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian terkait dengan pengembangan suatu objek wisata yang kurang menjamin suistabilitas lingkungan ada di sekitar objek wisata seperti kurangnya pemerintah desa dalam melakukan perlindungan terhadap wisatawan dengan memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi dan kurangnya pemerintah desa dalam mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan kepariwisataan secara adil serta kurangnya Pemerintah desa dalam membuat kebijakan terkait perlindungan dan pemeliharaan budaya dan seni tradisional di masyarakat.

6. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari

Kabupaten Ciamis kurang memelihara karakter dan budaya lokal yang unik karena pemerintah desa kurang memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis dalam mengembangkan potensi wisata Bukit Meralaya dan Pemerintah desa kurang melakukan pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya peka terhadap tradisi dan budaya yang ada di masyarakat serta kurangnya Pemerintah desa menjaga sumber daya alam, sosial dan budaya dalam pengembangan objek wisata . Pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan baik sehingga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat lokal, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis, peka terhadap tradisi budaya dan agama setempat, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal khususnya.

Menurut Suwanto (2002:50) menyatakan bahwa : “Bentuk pariwisata yang dikembangkan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis, peka terhadap tradisi budaya dan agama setempat dan tidak harus menempatkan setiap anggota masyarakat tuan rumah dalam posisi *inferiory*”.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian terkait dengan pembangunan pariwisata dalam memelihara karakter dan budaya lokal yang unik yang antara lain kurangnya pemerintah desa memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis dalam mengembangkan potensi wisata Bukit Meralaya dan kurangnya Pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya untuk peka terhadap tradisi dan budaya yang ada di masyarakat

serta kurangnya Pemerintah desa dalam menjaga sumber daya alam, sosial dan budaya dalam pengembangan objek wisata.

7. Membantu mengembangkan *cross cultural learning*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis kurang membantu mengembangkan *cross cultural learning* karena pemerintah desa kurang membina hubungan yang seimbang antara wisatawan dengan masyarakat setempat dan kurangnya pemerintah desa memberikan keuntungan yang adil bagi masyarakat setempat serta kurangnya Pemerintah desa berupaya bersama-sama dalam menjaga lingkungan.

Pengembangan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat atau *community based tourism* (CBT) adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal.

Hadiwijoyo (2012:71) menyatakan bahwa : ”Model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal”.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian terkait dengan pembangunan pariwisata untuk

membantu mengembangkan *cross cultural learning* hal ini dikarenakan Pemerintah desa kurang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung sehingga tidak menimbulkan kerusakan, menghormati sosial budaya masyarakat setempat dan memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan terdistribusi secara adil pada seluruh *stakeholders*.

8. Menghormati perbedaan-perbedaan cultural dan kehormatan manusia

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis kurang menghormati perbedaan-perbedaan cultural dan kehormatan manusia karena .

Pembangunan yang berkelanjutan termasuk pembangunan sektor pariwisata harus memperhatikan semua aspek atau factor-faktor yang berpengaruh terhadap sebuah ekosistem, sehingga pembangunan tersebut selain tidak merusak ekosistem fisik, juga harus dapat diterima atau tidak mengganggu system social dan budaya masyarakat setempat.

Menurut Pitana (2009:27) menyatakan bahwa :

Pengembangan pariwisata yang berbaur dengan kegiatan masyarakat sehingga sumber daya alam, budaya, industri, kearifan-kearifan lokal, dan sumber daya lokal lainnya yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang dijadikan sebagai obyek dan daya tarik pariwisata yaitu daya tarik wisata tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat lokal mendapatkan keuntungan ekonomi yang digunakan untuk kesejahteraan hidupnya dan menjaga kelestarian sumberdaya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian terkait dengan pengembangan pariwisata belum menghormati perbedaan-perbedaan cultural dan kehormatan manusia hal ini dikarenakan kurangnya Pemerintah desa dalam bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam mengembangkan objek wisata , dengan menghargai tradisi budaya dan agama setempat serta kurangnya Pemerintah desa dalam menjaga kelestarian lingkungan objek dan daya tarik wisata.

9. Mendistribusikan keuntungan yang adil di antara anggota masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis kurang mendistribusikan keuntungan yang adil di antara anggota masyarakat karena Pemerintah desa belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat dan Pemerintah desa kurang mendukung dan menjamin pelestarian budaya dan sumber daya masyarakat setempat serta Pemerintah desa kurang memberikan keuntungan ekonomi yang secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sebagian keuntungan yang diperoleh dari pengembangan pariwisata akan diberikan kepada masyarakat lokal. Artinya, pengembangan pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk menjaga kelestarian sumber daya yang ada.

Menurut Pitana (2009:27) menyatakan bahwa : “Bentuk pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan memiliki keunggulan tersendiri seperti; penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat, pendukung pelestarian budaya, adanya keyakinan yang lebih menjamin bagi upaya pelestarian sumber daya masyarakat setempat, dan adanya keuntungan ekonomi yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat”.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian terkait dengan pengembangan pariwisata karena kurang mendistribusikan keuntungan yang adil di antara anggota masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya pemerintah desa dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat dan kurangnya Pemerintah desa dalam mendukung dan menjamin pelestarian budaya dan sumber daya masyarakat setempat serta Pemerintah desa kurang memberikan keuntungan ekonomi yang secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat.

10. Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis kurang menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat karena Pemerintah desa belum merangsang tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata Bukit Meralaya dan Pemerintah desa kurang melaksanakan pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya secara efektif

dan efisien serta kurangnya Pemerintah desa melaksanakan pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya secara akuntabel sehingga memberi manfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat.

Menurut Anindita (2015:13) menyatakan bahwa : “Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif”.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian terkait dengan pengembangan pariwisata karena kurang menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat dari pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya hal ini dikarenakan dalam pengembangan pariwisata pemerintah desa belum merangsang tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata Bukit Meralaya dan Pemerintah desa dalam melaksanakan pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya kurang dilakukan secara efektif dan efisien serta kurangnya Pemerintah desa melaksanakan pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya secara akuntabel sehingga kurang memberi manfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengembangan Potensi Wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, dapat penulis simpulkan bahwa

: pengembangan potensi wisata Bukit Meralaya oleh pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis secara umum belum dapat melaksanakan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata secara maksimal sebagaimana pendapat Hadiwijoyo (2005:72), hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan mempromosikan potensi wisata Bukit Meralaya yang ada di Desa Mekarsari, selain itu pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan potensi wisata Bukit Meralaya sehingga keberadaan potensi wisata Bukit Meralaya di Desa Mekarsari kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa keberadaan potensi wisata Bukit Meralaya oleh pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis kurang dikembangkan dengan baik sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di Desa Mekarsari hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang tidak bekerja sehingga belum mendapatkan manfaat dari keberadaan objek wisata, selain itu pemerintah desa kurang melakukan promosi keberadaan potensi wisata Bukit Meralaya dengan menggunakan media sosial sehingga keberadaan potensi wisata Bukit Meralaya belum dikenal secara luas oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anindita, M. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan ke Kolam Renang Boja*. Semarang:

Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Fandeli, (2012). *Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata jatiluwih tabanan bali*. Kawistara, Vol 03 No 02 Hal 177-226.

Oka Yoeti. (2007). *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata* Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Pitana, I Gde. dan Surya Diarta, I Ketut. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Siswanto. (2010). *Ekowisata pengembangan, partisipasi lokal, dan tantangan ekowisata*. Denpasar: Cakra Press.

Sunaryo. Bambang , (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pagriwisata*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Waluyo. (2007). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Yoeti, Oka. (2011). *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Penerbit Angkasa

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No 43 tahun 2015
tentang Desa

rencana induk pengembangan
kepariwisataan Provinsi Jawa
Barat tahun 2015-2025

Peraturan Pemerintah Nmor 50 Tahun
2011 bahwa pembangunan
pariwisata

Peraturan Desa Mekarsari Nomor 2
Tahun 2020 tentang
Pengembangan Desa Wisa

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 15 tahun 2015 tentang